MEMETAKAN URUSAN AGAMA DI DAERAH PASCA OMNIBUS LAW

Jorawati Simarmata

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kementerian Hukum dan HAM, Riau
Email : jor4w4t1@yahoo.com

Diterima: 10 Maret | Disetujui: 15 April | Dipublikasikan 22 April

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis urusan agama di daerah dengan menggunakan metode penelitian *library riset*. Pertama, urusan agama di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi bercabang menjadi dua urusan yaitu urusan absolut dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama; dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam konteks dekonsentrasi, daerah menjadi wilayah administrasi yang notabene adalah kewenangan pemerintah pusat. Kedua, beberapa urusan agama dimungkinkan dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum antara lain (1). Pendirian rumah ibadat; (2).Pemberdayaan Badan Amil Zakat dan Infak (BAZIS); (3).Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ); (4).Dukungan bagi penyelenggaraan haji; dan (5).Dukungan untuk pendidikan agama dan pondok pesantren; (6).Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/walikota terkait keagamaan; dan (7).Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat yang bersifat keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Ketiga, Omnibuslaw memperkuat UU No. 23 Tahun 2014 bahwa agama adalah urusan pemerintah pusat.

Kata Kunci : Urusan Agama, Dekonsentrasi, Pemerintah Pusat, Daerah

Abstract

[MEMETAKAN URUSAN AGAMA DI DAERAH PASCA OMNIBUS LAW]. *This study aims to analyze religious affairs in the regions using the library research method. First, religious affairs in the regions based on the principle of deconcentration branch into two functions, namely absolute affairs carried out by vertical agencies in the regions, in this case the Regional Office of the Ministry of Religion; and general government affairs are carried out by the Governor and the Regent/Mayor. In the context of deconcentration, regions become administrative areas which incidentally are under the authority of the central government. Second, it is possible for several religious affairs to be carried out by the Governor and / or the Regent /Mayor as the person in charge of general government affairs, among others (1). Construction of synagogues; (2).Empowerment of the Zakat and Infaq Agency (BAZIS); (3).Implementation of Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ); (4). Support for organizing the hajj; and (5). Support for religious education and Islamic boarding schools; (6). Establishment of regional regulations and Governor/Regent/ Mayor Regulations related to religion; and (7). Providing grants and social assistance for religious community groups and community organizations in the religious sector. Third, Omnibuslaw strengthens Law No. 23 of 2014 that religion is the matter of the central government.*

Keywords : *religious affairs, deconcentration, central government, regions.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Ada banyak bukti yang tak terbantahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan yang kita peroleh adalah atas berkat rakmat Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya di dalam Alinea ke-4, tercantum sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, agama sebagai dasar negara secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1, yakni "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Bukti lainnya bahwa Indonesia bukanlah negara yang memisahkan urusan negara adalah eksistensi Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" di Indonesia.

Mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia maka adalah suatu keniscayaan jika seluruh bidang kehidupan diurus oleh negara sampai ke pelosok daerah se-Indonesia. Kondisi demikian telah difikirkan oleh para pendiri negara sehingga dinyatakan di dalam konstitusi, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi bahwa untuk urusan negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat, untuk urusan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan konteks ini

maka daerah tidak boleh menyelenggarakan urusan yang bukan urusannya (kewenangannya). Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014, ada 3 jenis urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Masing-masing urusan tersebut telah didefinisikan secara jelas. Dalam hal ini untuk urusan absolut dan urusan pemerintahan umum adalah kewenangan negara (pemerintah pusat), daerah tidak bisa masuk ke dalamnya. Untuk urusan pemerintahan konkuren, daerah bisa masuk karena sudah dipetakan secara jelas dan tegas kewenangannya. Jika urusan agama adalah urusan konkuren maka daerah bisa masuk di dalamnya. Pada kenyataannya secara normatif, urusan agama merupakan urusan absolut. Dengan demikian maka urusan agama merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pada prinsipnya, daerah baik provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia turut bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita/tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mengingat bahwa tujuan akhir agama adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dalam perspektif urusan agama ini, tujuan negara yang menjadi tanggung jawab daerah adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, urusan agama di daerah sebenarnya juga merupakan

wujud tanggung jawab daerah dalam bingkai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana urusan agama dalam konteks dekonsentrasi di daerah?
2. Bagaimana format urusan agama di daerah ?
3. Bagaimana format urusan agama di dalam omnibus law?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah jenis penelitian *library riset*, yaitu penelitian perpustakaan, dengan mengkaji buku-buku yang ada dan berhubungan, kemudian disajikan secara naratif pada tulisan ini, dan menggunakan pendekatan deduktif, dan tidak menggunakan sampel dan rumus kualitatif maupun rumus kuantitatif, bukan pula ingin menguji potes layaknnya penelitian kuantitatif, atau triangulasi pada penelitian kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Ada sejumlah kebijakan daerah/peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terkait dengan urusan agama antara lain terkait pengelolaan zakat, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan di bidang keagamaan (madrasah diniyah takmiliyah), kegiatan bulan suci ramadhan, penertiban kegiatan pada bulan ramadhan, pesantren, tata cara perizinan pendirian bangunan rumah ibadat, dll. Hal ini menunjukkan bahwa daerah juga mengatur urusan agama di daerahnya sedangkan di daerah sudah ada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berwenang mengurus urusan agama. Disamping itu ada juga beberapa daerah di Indonesia mempergunakan sebagian dari APBD nya dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat/organisasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang keagamaan.

2. Pembahasan

1. Dekonsentrasi urusan agama di daerah.

Sejak Indonesia merdeka hingga kini, urusan agama adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan negara (pemerintah pusat). Hal ini dikarenakan secara konstitusional, urusan agama adalah perwujudan tugas negara dalam rangka menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu asas dekonsentrasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menjadi dasar yang menjustifikasi hal tersebut.

Secara teoritis menurut para ahli, dekonsentrasi hanya memuat 2 (dua) makna yaitu (1). Pendapat Larmours and Qalo (1985:6) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi; dan (2).

Pendapat Benjamin Hoesin (2000:11) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya. Di sisi lain, Smith BC (1983:8) berpendapat bahwa secara umum ciri-ciri dekonsentrasi antara lain :

1. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari Pemerintah Pusat kepada pejabat pemerintah pusat di daerah.
2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat di daerah.
3. Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur.
4. Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom, tetapi menciptakan wilayah administratif.
5. Keberadaan *field administration* berada dalam hierarki pemerintah pusat.
6. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intraorganisasi.
7. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

Dalam asas dekonsentrasi, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki paradigma baru diluar teori dekonsentrasi menurut para ahli di atas. Paradigma baru tersebut adalah selain sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dekonsentrasi juga dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dalam paradigma

baru ini, Kepala Daerah dimungkinkan untuk mengurus urusan pemerintah pusat bukan sebagai wakil pemerintah pusat akan tetapi dalam kerangka urusan pemerintahan umum.

Dari sisi tipe kelembagaannya, Shabbir Cheema, G dan Dennis A. Rondinelli (1983:14) menyatakan bahwa *field administration* diwakili oleh keberadaan pegawai dari instansi vertikal pemerintah pusat di lingkungan daerah (local jurisdiction) sedangkan *local administration* dilihat dari pemerintah daerah dalam suatu wilayah adalah "agen/wakil" dari pemerintah pusat (biasanya institusi eksekutif daerah) . Berdasarkan teori tersebut, dekonsentrasi yang dianut UU No. 23 Tahun 2014 membentuk pola tambahan selain *field administration* dan *local administration*. Kedua Pola, *field administration* dan *local administration*, dimasukkan UU No. 23 Tahun 2014 ke dalam urusan pemerintahan absolut. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) angka 2 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Pola baru tersebut memposisikan gubernur dan bupati/walikota dalam menjalankan asas dekonsentrasi sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Walaupun secara teoritis tidak dikenal pola tersebut, namun UU No. 23 Tahun 2014 memasukkan urusan pemerintahan umum ke dalam *field administration*.

Jika menganulir asas dekonsentrasi UU No. 23 tahun 2014 tersebut, maka untuk urusan absolut (agama) di daerah dimungkinkan dapat dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah (Kanwil

kementerian Agama), atau Gubernur sebagai Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui hal tersebut lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perbandingan Fungsi/wewenang
Instansi Vertikal di daerah (Kanwil
Kementerian Agama) dan Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat

N o	Fungsi Instansi Vertikal /Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	
1.	Fungsi Instansi Vertikal (Kanwil Kementerian Agama) berdasarkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2019)	1. Perumusan dan penetapan visi misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi
		2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama
		3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf
		4. Pelayanan, bimbingan dan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
		5. Pembinaan kerukunan umat beragama
		6. Perumusan kebijakan teknis, di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
		7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan, evaluasi program
		8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah

		instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di provinsi/kabupaten/kota
2	Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan PP No. 33 Tahun 2018	Tugas Pembinaan dan Pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan peraturan bupati/walikota
		2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
		4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		5. Melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota
		6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Tugas Lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

		2. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
		3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya
		4. Melantik bupati/walikota
		5. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
		6. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga negara nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang dibentuk pembentukan instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan

		absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
		7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka urusan pemerintahan absolut untuk urusan agama di daerah hanya fungsi dari instansi vertikal di daerah (Kanwil Kementerian Agama). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan sama kali untuk urusan agama di daerah.

2. Format urusan agama di daerah.

Di satu sisi urusan pemerintahan absolut terkait urusan agama di daerah hanya kewenangan Kanwil Kementerian Agama, namun disisi lain asas dekonsentrasi versi UU No. 23 Tahun 2014 memungkinkan urusan agama yang merupakan urusan pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum. Adapun Urusan pemerintahan umum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, Pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan rincian urusan pemerintahan umum tersebut, maka ada celah bagi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat terkait urusan agama. Adapun celah tersebut tampak pada angka 3, Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Di samping itu juga, urusan pemerintahan umum pada angka 7

memungkinkan bagi daerah khususnya Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum untuk melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam prakteknya di daerah urusan agama dilakukan oleh daerah dalam beberapa aspek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Fasilitasi pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah;
Gubernur dan Bupati/walikota memfasilitasi pendirian forum kerukunan umat beragama. Namun dalam hal pendirian rumah ibadah, hanya Bupati dan Walikota yang berwenang memberikan izin pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

2. Pemberdayaan Badan Amil Zakat dan Infak (BAZIS);

Dalam hal kewenangan pemberdayaan badan Amil Zakat dan Infak (BAZIS), Daerah membentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

3. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);

Terkait dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi sedangkan Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kabupaten/Walikota berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Seleksi Tilawatil Qur'an. Dana penyelenggaraan MTQ dan STQ bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

4. Dukungan bagi penyelenggaraan haji.

Dalam hal penyelenggaraan haji, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Gubernur atau Bupati/walikota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri dan biaya operasional petugas haji daerah dibebankan pada APBD. Transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk pada akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji. Biaya dibebankan pada APBN dan APBD.

5. Dukungan untuk pondok pesantren dan pendidikan diniyah.

Terkait dukungan daerah untuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, berdasarkan UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, daerah maka daerah dapat memfasilitasi mesjid

atau mushola pesantren, ikut dalam pembiayaan pembentukan majelis masyayih, memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan, serta memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang paling sedikit berupa bantuan dana, bantuan sarana dan prasarana, teknologi, dan ketrampilan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan keagamaan Islam (baik Pesantren maupun pendidikan Diniyah) dapat bersumber dari APBD. Disamping itu, berdasarkan peraturan menteri ini, daerah berperan dalam melakukan pembinaan bersama Kementerian Agama terhadap Pendidikan diniyah nonformal yang terdaftar di Kementerian Agama.

6. Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati terkait dengan keagamaan

Kewenangan Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Gubernur/Bupati/walikota)

bersumber dari Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dasar pembentukan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dapat dari kewenangan (atribusi) ataupun ada perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk peraturan daerah/peraturan kepala daerah terkait dengan keagamaan, daerah dapat membuatnya sepanjang ada kewenangan daerah

terkait agama. Mengingat daerah tidak berwenang mengurus urusan pemerintahan absolut (urusan agama), maka daerah hanya dimungkinkan untuk membuat perda yang sumber kewenangannya berasal dari urusan pemerintahan umum yang ada dasar peraturan perundang-undangannya (undang-undang atau peraturan Pemerintah atau peraturan menteri agama). Dengan demikian pembentukan perda/perkada terkait dengan urusan pemerintahan umum tersebut antara lain:

- a. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Contoh : Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik.
- b. Untuk melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Contoh : Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan haji, Perda tentang Pengelolaan Zakat, Perda tentang Pesantren, Peraturan Bupati tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, Peraturan daerah tentang pendidikan diniyah takmiliyah,

peraturan bupati tentang pedoman bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan, peraturan daerah tentang pendidikan non formal madrasah diniyah takmiliyah, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam, Peraturan Bupati tentang Kegiatan Bulan Suci Ramadan, Peraturan Bupati tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan.

7. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat yang bersifat keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara itu Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat

yang bersifat keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan. Namun pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut harus dilakukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu dari kelompok masyarakat yang bersifat keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan kepada kepala daerah (Gubernur atau Bupati/walikota).

3. Format urusan agama dalam omnibus law.

Istilah Omnibus law merupakan istilah yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Kata omnibus juga dipakai dalam moto atau semboyan negara Swiss yakni "*unus pro omnibus, omnes pro uno*" yang memiliki arti "satu untuk semua, semua untuk satu" yang menyimbolkan Swiss sebagai negara yang mencintai perbedaan dan pluralisme. Meski terbilang produk hukum baru di Indonesia, omnibus law lazim dipakai negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Omnibus law* di Amerika Serikat (AS) dikenal dengan *omnibus bill*, merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subyek, isu dan programnya tidak selalu saling terkait

(<https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>).

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan UUD Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan hal ini maka setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum. Negara tidak dapat menyebut dirinya menjunjung hukum dan pemerintahan apabila melaksanakan kewenangan tanpa adanya dasar hukumnya. Terlepas dari pro kontra terhadap *omnibus law*, ada kelebihan dan kelemahan dari *omnibus law* ini dalam sistem hukum Indonesia. Gilang Ramadhan (2020: 176) mengemukakan kelebihan dari *omnibus law* yaitu bisa digunakan sebagai cara untuk menghilangkan pertentangan antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

- Harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
- Menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.
- Mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah. Karena telah diatur dalam kebijakan omnibus law yang terpadu.
- Para pengambil kebijakan memiliki jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Selanjutnya Gilang Ramadhan (2020: 177) mengemukakan kelemahan *omnibus law*:

- a. Kedudukan Undang-Undang dari konsep *omnibus law* belum diatur
- b. *Omnibus law* berpotensi dapat mengabaikan ketentuan formal pembentukan Undang-Undang.
- c. *Omnibus law* mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d. *Omnibus law* dapat menambah beban regulasi jika gagal diterapkan.

Untuk prakteknya di Indonesia, sistem hukum dan pemerintahan Indonesia yang cenderung bersifat doctrinal (tertulis) sangat berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang non-dotrinal (tidak tertulis), sehingga upaya untuk melakukan penggabungan undang-undang atau omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu diberikan kondisi penyesuaian atau modifikasi (Vincent Suriadinata 2019:118).

Sebagai *omnibus law* pertama di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur banyak klaster peraturan perundnag-undangan dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi pancasila. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, *ominbus law* mengatur materi muatan terkait kemudahan berusaha.

Dalam rangka kemudahan berusaha *omnibus law* merombak perizinan di sektor keagamaan. Akibatnya terjadi perubahan signifikan dalam peraturan perundang-undangan yang berbau

agama yaitu UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Beberapa perubahan dalam UU No. 8 Tahun 2019 dibandingkan dengan ketentuan dalam *omnibus law* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Ketentuan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan ketentuan *omnibus law*

No	UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	<i>Omnibus law</i> UU No. 11 Tahun 2020
1.	Pasal 1 angka 11 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus.	Pasal 68 angka 1 Pasal 1 angka 11 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus.
2.	Pasal 1 angka 19 Penyelenggara Perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU dalam biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.	Pasal 68 angka 1 Pasal 1 angka 19 Penyelenggara Perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU dalam biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
3.	Pasal 20 Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah kerajaan Arab Saudi.	Pasal 68 angka 3 Pasal 20 Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah

		kerajaan Arab Saudi.
4.	Pasal 59 ayat (1) Pelaksanaan ibadah haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri .	Pasal 68 angka 5 Pasal 59 ayat (1) Pelaksanaan ibadah haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Pemerintah Pusat .
5.	Pasal 83 ayat (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji khusus.	Pasal 68 angka 8 Pasal 83 ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji khusus.
6.	Pasal 85 (1) Menteri melaksanakan akreditasi PIHK. (3) Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK. (5) Menteri mempublikasikan hasil akreditasi PIHK kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.	Pasal 68 angka 10 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PIHK. (3) Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PIHK. (5) Pemerintah Pusat mempublikasikan hasil akreditasi PIHK kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
7.	Pasal 89 Untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PPIU, Biro Perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia beragama islam dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri .	Pasal 68 angka 11 Pasal 89 Untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PPIU, Biro Perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia beragama islam dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh

		pemerintah pusat.
8.	Pasal 90 ayat (1) Pelaksanaan ibadah umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat izin dari menteri .	Pasal 68 angka 14 Pasal 90 ayat (1) Pelaksanaan ibadah umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat izin dari pemerintah pusat .
7.	Pasal 91 ayat (2) Pembukaan kantor cabang PPIU harus dilaporkan kepada kantor kementerian agama di kabupaten/kota setempat .	Pasal 68 angka 13 Pasal 91 ayat (2) Pembukaan kantor cabang PPIU harus dilaporkan kepada pemerintah pusat .
9.	Pasal 99 ayat (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggara ibadah umrah.	Pasal 68 angka 17 Pasal 99 ayat (1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengevaluasi penyelenggara ibadah umrah.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas, terdapat penarikan kewenangan dari menteri agama oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan urusan agama yang ditarik Pemerintah Pusat antara lain:

- melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah kerajaan Arab Saudi;
- memberikan izin bagi pelaksanaan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh PIHK;
- melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- melaksanakan akreditasi PIHK.
- menetapkan standar akreditasi PIHK.
- mempublikasikan hasil akreditasi PIHK kepada masyarakat secara

- elektronik dan/atau nonelektronik.
- g. menetapkan persyaratan/norma, standar, prosedur dan kriteria bagi perizinan berusaha;
- h. memberikan Izin berusaha bagi biro perjalanan menjadi PPIU (pelaksanaan ibadah umroh).
- i. menerima laporan Pembukaan kantor cabang PPIU.
- j. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggara ibadah umrah.

Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam omnibus law ini, urusan agama tidak diserahkan kepada instansi vertikal (kementerian) dan tidak diturunkan menjadi urusan daerah. Sementara itu, berdasarkan asas dekonsentrasi UU No. 23 Tahun 2014, untuk urusan absolut terdapat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada instansi vertikal (Kementerian). Namun omnibus law ini tidak mengakomodir asas dekonsentrasi versi UU No. 23 Tahun 2014. Dengan kata lain Omnibus law justru tidak memfungsikan asas dekonsentrasi untuk urusan agama karena tidak ada penyerahan kewenangan kepada instansi vertikal (Kementerian).

Istilah Pemerintah Pusat didefinisikan oleh omnibus law junto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan definisi ini maka penarikan kewenangan urusan agama dalam omnibus law memberikan keleluasaan kepada presiden untuk langsung menangani urusan agama dan/atau menyerahkannya kepada wakil

presiden; dan/atau menyerahkan secara teknis kepada lembaga/kementerian lain atas nama presiden; dan/atau menyerahkannya kembali kepada menteri agama secara teknis akan tetapi dilakukan atas nama presiden.

Secara normatif, ketentuan mengenai penarikan kewenangan menteri agama oleh pemerintah pusat ditegaskan kembali dalam peraturan turunan *omnibus law* yaitu PP No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dalam Peraturan pemerintah ini dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perizinan Berusaha yang diselenggarakan di daerah antara lain di sektor keagamaan. Namun dalam Pasal 6 ayat (6) PP No. 6 tahun 2021 menegaskan bahwa sektor keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan berusaha di daerah. Dengan demikian daerah tetap tidak berwenang untuk mengeluarkan izin kemudahan berusaha di bidang keagamaan akan tetapi proses pengurusannya dengan mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan di daerah melalui sistem yang terintegrasi dengan pusat.

Selain keagamaan, ada sektor lain dalam rangka kemudahan berusaha yang diakomodir *omnibus law* yaitu sektor yang dinamakan *omnibus law* sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk legal dan standarisasi penilaian kesesuaian. Sektor ini memuat pengaturan jaminan produk halal yang terkait dengan urusan agama. Undang-Undang yang terkait dengan sektor jaminan produk legal yaitu UU No. 34

Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam omnibus law maka terdapat perbandingan sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Perbandingan Ketentuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan ketentuan *omnibus law*

No	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	<i>Omnibus law</i> UU No. 11 Tahun 2020
1.	Pasal 10 ayat (1) Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk : a. sertifikasi auditor halal; b. penetapan kehalalan produk; dan c. akreditasi LPH	Pasal 48 angka 4 Pasal 10 ayat (1) Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk.
2.	Pasal 16 Ketentuan mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 48 angka 8 Pasal 16 Ketentuan mengenai LPH dan auditor halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3.	Pasal 29 Tidak ada diatur jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal.	Pasal 48 angka 12 Pasal 29 ayat (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.
4.	Pasal 31 ayat (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal.	Pasal 48 angka 14 Pasal 31 ayat (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
5.	Pasal 31 Tidak diatur LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu pemeriksaan kepada BPJPH.	Pasal 48 angka 14 Pasal 31 ayat (4) Dalam hal pemeriksaan produk memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH

		dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.
6.	Pasal 33 ayat (3) Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.	Pasal 48 angka 16 Pasal 33 ayat (3) Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.
7.	Pasal 35 Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima MUI.	Pasal 48 angka 17 Pasal 35 Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, terdapat perubahan yang paling signifikan dalam jaminan produk halal yaitu adanya pembatasan kerjasama antara BPJPH dengan MUI. Semula BPJPH berkerjasama dalam 3 (tiga) hal yaitu sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Namun omnibus law membatasi kerjasama BPJPH dengan MUI dalam 1 (satu) hal saja yaitu dalam hal penetapan kehalalan produk. Artinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak lagi melibatkan MUI dalam hal sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH. Disamping itu perubahan lainnya adalah jangka waktu yang dipersingkat dalam proses jaminan produk halal antara lain :

- semula tidak ditetapkan jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal, berdasarkan omnibus law dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

- b. Semula tidak ditetapkan jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal. Sementara itu omnibus law menetapkannya menjadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- c. Semula tidak diatur waktu tambahan bagi pemeriksaan produk, omnibus law mengatur bahwa dalam hal pemeriksaan produk memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.
- d. Semula sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH sedangkan omnibus law menetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.
- e. Semula sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima MUI sedangkan omnibus law menetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Dalam hal akreditasi LPH, BPJPH semula bekerjasama dengan MUI, namun *omnibus law* melalui turunan UU No. 11 Tahun 2020 (PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal), mengatur bahwa untuk melakukan akreditasi LPH, BPJPH membentuk tim tersendiri yaitu tim akreditasi LPH yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama dan ASN yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk. Sementara itu untuk sertifikasi auditor halal, BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga

yang memiliki kewenangan penjamin mutu kompetensi profesi.

Jika ditinjau dari segi kewenangannya maka berdasarkan Pasal 5 UU No. 33 tahun 2014, kewenangan Jaminan produk halal merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Kementerian Agama. Mencermati hal ini maka kewenangan jaminan produk halal merupakan kewenangan absolut yang tidak diserahkan kepada daerah. Dengan demikian pra omnibus law maupun pasca omnibus law, kewenangan jaminan produk halal ada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut, dibentuk BPJPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Daerah dapat masuk dalam urusan jaminan produk halal ini di dalam hal pendirian LPH. Dalam PP No. 39 Tahun 2021, dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mendirikan LPH yang merupakan fungsi unit kerja, Unit Pelaksanaan Teknis atau Perangkat Daerah. Disamping itu daerah juga dapat membentuk LPH yang didirikan oleh BUMD sebagai bagian dari unit usaha jasa BUMD atau anak perusahaan BUMD. Dengan ketentuan ini maka daerah memiliki urusan jaminan produk halal. Namun dari konteks dekonsentrasi, urusan jaminan produk halal ini dapat dianggap sebagai urusan pemerintahan umum dengan kategori Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Urusan agama di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi bercabang menjadi dua urusan yaitu urusan absolut dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama; dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam konteks dekonsentrasi, daerah menjadi wilayah administrasi yang notabene adalah kewenangan pemerintah pusat.
- b. Beberapa urusan agama dimungkinkan dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum antara lain:
 1. Pendirian rumah ibadah;
 2. Pemberdayaan Badan Amil Zakat dan Infak (BAZIS);
 3. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 4. Dukungan bagi penyelenggaraan haji;
 5. Dukungan untuk pendidikan agama dan pondok pesantren;
 6. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur/Bupati/walikota terkait keagamaan; dan
 7. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat yang

bersifat keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan.

- c. *Omnibuslaw* memperkuat UU No. 23 Tahun 2014 bahwa agama adalah urusan pemerintah pusat (urusan absolut).

2. Rekomendasi

1. Daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota harus lebih cermat dalam mempergunakan kewenangannya sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum sehingga kebijakan daerah/produk hukum yang dilahirkan oleh daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bahkan menyimpang dari kewenangan urusan pemerintahan umum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang no. 23 tahun 2014 maupun omnibus law.
2. Paska *omnibus law*, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk turut dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui pendirian LPH di daerah baik melalui perangkat daerah ataupun melalui bumd. Untuk itu alangkah baiknya daerah mengambil kesempatan ini dalam rangka mendukung upaya pemerintah pusat dalam kemudahan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Benjamin Hoessin (2000), *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Jurnal Bisnis dan Birokrasi Vo. 1 No. 1

Diambil kembali dari, <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>

Gilang ramadhan (2020), *Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi*, Malang :Yurisprudensi Jurnal Fakultas Hukum.

Larmours and Qalo (1985), *Decentralization in the South Pacific*, Papua New Guinea : University of South Pasific.

Smith, BC (1985), *Decentralization : The Territorial Dimension of State*, London :George Allen and Urwin Ltd.

Shabbir Cheema, G & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage.

Vincent Suriadinata (2019), *Penyusunan Undang-Undang di bidang investasi kajian pembentukan omnibuslaw di Indonesia*, Jakarta : Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vo 4 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan :

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. PP No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umroh
6. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
7. PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 dan Menteri Agama No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam